



Rusunawa Ditargetkan Selesai 2016

Kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, yang dikenal sebagai kampung nelayan tempat pelelangan dan pelabuhan ikan serta tempat makan ikan bakar, bakal ditata.

PUTRI ANISA YULIANTI

JIKA tidak meleset, tahun depan (2016) rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk nelayan sudah bisa ditempati. Rusunawa dijadwalkan mulai dibangun tahun ini oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro), salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah, Ika Lestari Aji, menegaskan bahwa pembangunan rusunawa khusus nelayan oleh PT Jakpro akan dilakukan tahun ini. Diharapkan penyelesaian serta relokasi bisa dilakukan pada awal tahun 2016. Dana yang dibutuhkan untuk membangun sebesar Rp133,6 miliar.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertanian DKI Jakarta, Darjamuni, mengaku telah mendata bangunan-bangunan liar yang ada di pesisir Muara Angke.

Untuk dana pembangunan rusunawa, Darjamuni menuturkan, berasal dari PT Jakpro. Dana yang dikumpulkan dari bentuk kompensasi yang diwajibkan pemprov kepada perusahaan pemegang surat izin penunjuk penggunaan pannah (SIPPT). Di kawasan tersebut ada 2.000 kepala keluarga yang mendirikan bangunan liar. Mereka telah masuk ke pendataan sebagai penerima unit rusunawa Muara Angke.

Dari pendataan itu, Darjamuni terkejut, karena hanya sekitar 15% warga yang benar-benar bergerak di bidang

usaha perikanan. Sisanya berprofesi sebagai pedagang warung makanan, buruh, dan pegawai swasta. Padahal, penerima rusunawa tematik khusus nelayan diprioritaskan bagi warga yang bergerak di bidang perikanan seperti nelayan, pengolah hasil laut, serta penjual.

Sebagian besar warga, ungkap Darjamuni, tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP). Mereka ialah warga hasil penertiban dari Kali Adem pada 2003 dan 2004. Pada saat itu Wali Kota Jakarta Utara menertibkan permukiman liar di Kali Aden karena tidak ada rusun untuk relokasi, warga dibiarkan tinggal sementara di Muara Angke hingga mendapat tempat tinggal baru. Namun, karena lemahnya pengawasan, mereka justru terus berkelanjutan menempati area tersebut.

"Mereka tinggal di sana ternyata tidak sementara, malah jadi berkelanjutan. Yang punya duit membangun permanen, tapi ada juga yang rumah papan. Padahal, itu tanah kita. Kalau mau di rusun silakan, tetapi kalau tidak, kita terpaksa tertibkan dan tidak boleh lagi bangun di situ," tegas Darjamuni.

Penataan, jelas Darjamuni, agar nelayan memiliki hunian dan tempat usaha layak.

Lokalisasi Usaha

Selain menata kawasan permukiman liar. Warung-warung makan dan restoran di Muara Angke juga akan ditata ulang. Tempat makan

akan dijadikan seperti pusat jajanan (*food court*).

Penataan pesisir Muara Angke merupakan program Pemprov DKI Jakarta, khususnya membangun rusunawa yang tematik. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menjelaskan setiap rusunawa tematik yang akan dibangun didesain untuk memudahkan kegiatan setiap penghuninya. Dalam desain rusunawa khusus nelayan, pemprov berencana membuat satu kanal untuk menyambungkan antara laut dan bangun rusunawa.

"Jadi nelayan yang tinggal di rusun, juga bisa jemur ikan di situ," ujar Ahok, akhir April lalu.

Kawasan Muara Angke menyimpan potensi lain. Di daerah ini, terdapat Suaka Margasatwa Muara Angke, kawasan hutan bakau seluas 25,02 hektare yang dihuni tak kurang dari 90 spesies burung.

Muara Angke merupakan bagian dari hutan bakau terakhir yang tersisa di Provinsi DKI Jakarta. Kawasan hutan Angke-Kapuk yang terdiri dari Suaka Margasatwa Muara Angke, Hutan Lindung dan Taman Wisata Alam Angke Kapuk merupakan hutan bakau yang terakhir yang dapat dijumpai di Jakarta. Kawasan hutan ini memiliki luas keseluruhan sekitar 170,60 hektare. Penataan dilakukan bertahap, diharapkan Muara Angke menjadi kawasan terpadu. (J-3)

putrianisa
@mediaindonesia.com